

DINAMIKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Florentinus Sudiran

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the general election of the mayor of Samarinda city in 2014. The location of it is in Samarinda. The research had been carried out in the year. The method of it is a descriptive kualitative and library one. The data is taken from the daily newspaper here. The result of it is that the general election mentioned above (1). It had been running well, (2). It was still any handicap, (3). The former mayor and regents (incombent/petahana) got the winners: among are Saharie Jaang in Samarinda city, Razal Effendi in Balikpapan city and Rita Widyasari in Tenggarong Regency. The new comers among are are Ismunandar from East Kutai regency, Geh from Mahulu, from West Kutai, Muharam From Berau, Mardikansyah from Paser, Neny from Bontang city, (4). Some are not fair play especially done by the succes-team (5). The former (incombent/petahana) got the majority. The suggestions are (1). The socialization of the election concerned has to prepare perfectly, (2). The execution of the election has to be direct, general, free, honest, justice and secret, (3). The supremacy of law concerned has to be taken seriously.

Keywords : election, law, mayor, supremacy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut surat kabar harian KaltimPost tanggal 26 Juli 2016 pihak Partai Golongan Karya (Golkar) bahwa Pilkada serentak Desember 2016 di seluruh Indonesia benar-benar menjadi ujian bagi Partai Golkar. Nama besar mereka kini di ujung tanduk setelah konflik pengurusan belum juga menemui titik temu. Masalah pun bertambah pelik, ketika simpatisan di daerah mulai kehilangan arah. Konflik terjadi antara lain di Balikpapan bahwa puluhan simpatisan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) beraksi di Kantor DPP II Golkar setempat di jalan Jendral Sudirman. Mereka membakar aset kantor berupa kursi dan buku di halaman kantor. Kaca majalah dinding yang memuat aktivitas organisasi juga tak luput dipecahkan. Kaca berserakkan, lalu asap mengepul, membuat lalu lintas di kawasan tersebut menjadi perhatian. Beberapa saat kemudian, aksi mampu dikendalikan setelah petugas dari Polres Balikpapan melakukan pengamanan. Ketua AMPG Balikpapan NG Priyo mengatakan, aksi tersebut adalah ultimatum kepada petinggi partai. Akibat dualisme kepemimpinan, dia menyebut Golkar terancam hanya jadi penonton. Sebuah catatan pahit jika hal itu benar-benar terjadi pada Pilkada tahun ini. Jika kader Golkar tak ambil bagian pada pesta demokrasi kali ini, Priyono menegaskan, Balikpapan tak akan melihat partai beringin lagi. Dia menyebutkan, pendapat itu bukanlah isapan jempol. Pasalnya, selagi dua pengurus bersitegang – Aburizal Bakri (ARB) dan Agung Laksono (AL) – tak juga rujuk, belakangan muncul kabar jika Golkar mendukung salah satu kandidat di Balikpapan yang notabene bukan rekomendasi partai.

Priyono mengatakan, Golkar bulat mendukung pencalonan Andi Burhanuddin Solong (ABS) sebagai calon wali kota Balikpapan periode 2015 – 2020. Hingga hari ini (kemarin, red) isunya SK (surat keputusan) sudah dipakai oleh orang lain. Itu yang membuat resah masyarakat Golkar di Balikpapan, klaim dia, lantang. Masih kata Priyono, sebanyak 67 ribu masyarakat Golkar yang dilanda ketidakpastian. Ketika muncul kabar beringin tak akan mengusung kadernya di Pilwali Balikpapan nanti, Priyono menyebut harus berlari ke Timur dan Barat Kota Minyak menemui simpatisan, demi memberikan penjelasan. Bahwa kabar itu tak sepenuhnya benar. Untuk versi AL sudah ada, tinggal ARB ini yang goyah. Untuk versi AL, sudah deal mendukung Pak ABS.

Kekecewaan AMPG diperparah ketika KPU membuka pendaftaran namun tak ada tanda-tanda aktivitas sedikit pun di Sekretariat Golkar Balikpapan. Hal itu, disebutnya langkah mundur. Padahal pendaftaran hanya tersisa tiga hari. Daftar harus (bermodalkan) SK. Saya kecewa. Saya tegaskan kalau kader Golkar tidak ikut, tidak ada Pilkada di Balikpapan, ucapnya. Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kalimantan Timur Akhmad Albert meminta simpatisan tenang. Pasalnya, rapat Pleno penetapan kandidat yang akan diusung GOLKAR baru diproses malam tadi di Jakarta. Dia menyambut, peluang ABS – Abdul Hakim. Apapun keputusan partai,

Golkar Kalimantan Timur akan tetap fight. Calon yang di usung harus menang. Misi kami adalah kader terbaik yang mampu membawa pembaharuan, tegasnya.

B.Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah, "Bagaimana dinamika Pilkada di Kalimantan Timur tahun 2016 ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan pada jurnal ini ingin mengetahui bagaimana dinamika Pilkada di Kalimantan Timur tahun 2016.

D.Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian yaitu :

1. Ingin mengembangkan Ilmu Hukum Administrasi Negara pada khususnya dan Ilmu Hukum pada umumnya pada pelaksanaan demokrasi di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PILKADA
2. Hasil penelitian ini sebagai data awal bagi peneliti yang akan datang

II. KERANGKA DASAR TEORI

A.Hukum

Menurut Montesquieu bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lainnya baik mengenai fungsi maupun alat kelengkapan yang melakukannya (Ismail Suny, 1985:2). Khusus yudikatif adalah berisikan masalah hukum yang kedudukannya netral. Definisi hukum secara umum adalah suatu aturan baik tertulis maupun lisan yang bila dilanggar akan mendapat sanksi. Sanksi juga dapat dibedakan yaitu sanksi formal dan sanksi masyarakat. Dalam studi hukum diberikan suatu pengantar ilmu Hukum. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) ialah suatu ilmu yang :

1. Merupakan pengantar atau dasar bagi setiap orang dalam mempelajari ilmu hukum yang amat luas ruang lingkungannya.
2. Memberikan dan menanamkan kepada setiap orang yang mempelajari ilmu hukum.

Kekuasaan Kehakiman atau yudikatif secara konstitusional tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 setelah perubahan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dan agama, militer, tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ilmu hukum ialah pengetahuan yang khusus mengajarkan kepada kita perihal hukum dan segala seluk beluk yang berkaitan di dalamnya, misalkan sumber-sumbernya, wujudnya, pembagian macamnya, sifatnya, sistemnya dan segala

faktor yang baik serta langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya dan sebagainya. Dalam ilmu hukum adadua hal yaitu :

1. Pengantar Ilmu Hukum pada hakekatnya merupakan pedoman ataudasar dari pengetahuan hukum di mana didalamnya tertanam pengertian pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu ilmu atau pengetahuan hukum.
2. Pengertian disiplin Hukum. Disiplin Hukum pada dasarnya ialah suatu sistem ajaran tentang hukum. Ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada Disiplin hukum. Menurut Prof Purnadi Purbacaraka, SH, ruang lingkup Disiplin Hukum dan Ilmu Hukum dapat dilukiskan melalui bagan berikut ini :



B. Supremasi hukum

Supremasi hukum adalah suatu tindakan untuk menegakkan hukum agar terjadi keadilan, kebenaran dan kewibawaan. Di dalam negara yang penegakan hukumnya bagus akan diikuti oleh kinerja yang lain seperti kesejahteraan di lingkungannya. Hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup masyarakat.

Hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan tidak mungkin dapat diceraikan pisahkan antara satu sama lain. Disamping itu, tidak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum itu juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang baik dan sewajar mungkin. Masyarakat ialah sekelompok orang-orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula.

C. Partai Politik

Menurut peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dana kampanye peserta pemilihan Kepala daerah bahwa partai politik nasional peserta pemilu anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan DPR Kabupaten/Kota. Sedangkan Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau gabungan partai politik lokal dan DPR Kabupaten/Kota yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan Kepala Daerah.

III. PEMBAHASAN

Politik di Pilwali Samarinda memang bergerak lamban. Namun untuk arah dukungan partai perlahan terlihat. Meskipun belum keputusan final, namun partai sudah mulai bergerak dengan calonnya. Dua petahan A Syaharie Jaang – Nusyirwan Ismail (incumbent) terlihat sudah mantap untuk mendulang suara layaknya Pilwali tahun 2010 lalu. Keputusan tersebut nyata dengan dukungan resmi dari empat partai, yakni Demokrat, Nasional Demokrat, PKS, dan PPP. Menurut James Bastian Tuwo Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur walaupun baru 17 kursi yakin menang.

Dia mengatakan, saat ini dukungan sudah pasti kepada Jannur, tak ada yang lain. Yang dia cemaskan hanyalah eksistensi calon lawan. Jika tak ada lawan, Pilkada diundur, tuturnya. Seperti yang diprediksi, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dari awal mendukung Jaanur mengubah arah ke Dayang Donna Faroek yang berpasangan dengan Jafar Abdul Gaffar. Bukan tanpa alasan jika PAN berbuat demikian. Pasalnya, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PAN dicueki oleh Jaang. Memberikan respon pun tidak.

Diperkirakan Partai Amanat Nasional (PAN) menarik diri (Tuwo.KaltimPost,2014) Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ketua DPD PAN Samarinda Fahrizal Helmi Hasibuan tak banyak berkomentar. Dia hanya menyatakan akan mengusung calon baru dari PAN. Dialah putri gubernur Kalimantan Timur, Dayang Donna Faroek, yang telah menjadi kader PAN dan diusung sebagai bakal calon wakil wali kota. Namun, untuk walikotanya masih dirahasiakan.Ia mengaku masih melihat perkembangan selanjutnya, besok akan mendaftar, tuturnya. Sementara itu, dari Golkar versi Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Tim Pilkada Dahri yasin menyatakan sudah meninggalkan ibukota dan masih menunggu keputusan DPP Golkar mengenai bakal calon yang akan diusung oleh beringin. Menurut Dahri Yasin perkembangan terakhir, Jafar – Donna. Dia mengaku, rekomendasi Jaang–Jafar juga muncul, namun berubah jadi Jafar – Donna. Sebab, saat ini telah kembali dengan wakilnya. Kemungkinan masih bisa berubah, masih ada waktu, katanya. Dahri menyatakan, untuk Jafar – Donna ada empat partai yang mendukung, yakni : Golongan Karya(Golkar),Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Yang sudah resmi mengeluarkan rekomendasi adalah Golkar, PAN, Hanura, sementara Gerindra masih sebatas persetujuan belum ada rekomendasisehingga bisa berubah.

Apakah Golkar masih mencari celah untuk berpasangan dengan Jaang, Dahri menjawab, bukan mencari celah, sebab Jafar secara pribadi mengundurkan diri dari penjarangan, tak hanya itu dia juga terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Namun bila Golkar menugaskan Jafar mau tak mau harus dilaksanakan, katanya lagi. Saat PDI Perjuangan sedang galau, manuver yang dilakukan oleh Donna jelas bikin pusing partai banteng moncong putih itu. Padahal sebelumnya, nama Zuhdi Yahya – Donna (serta Jafar – Siswadi) sempat mengerucut. Lalu berubah sehingga kenyataannya satu pihak ada yang siap-siap maju tak bersedia. Ada juga yang menyambangi, memberikan visi dan misi, lalu

ngomong saja. Menurut ketua DPD PDIP Kalimantan Timur Dodi Rondonuwu cuma kecap, kata menyindir tanpa menyebut nama. Dodi mengaku tak memprediksi sikap tersebut. Pasalnya, figur yang dimaksud datang dan memberikan pembicaraan manis. Padahal kami sudah percaya, malah dibohongi, sebutnya.

Tapi, PDIP masih memiliki Kader setia seperti Siswadi, Sevana Podung, dan Zuhdi Yahya. Sebagai patai presiden bukankah menjadi aib jika tak bisa mengusung calon, PDIP hanya satu kursi untuk bisa maju mengusung. Yang jelas PDIP akan mencalonkan sampai batas waktu yang ditentukan. Informasi yang dihimpun harian ini, Bob Daud juga masuk hitungan dari PDIP. Surat rekomendasi Bob sebagai bakal calon wali kotadari PDIP sudah keluar tapi belum di tanda tangani bisa saja dibuat-buat, masih dirapatkan lagi siapa yang bakal diusung.

Hari pertama pendaftaran di KPU (KPU) tanggal 26 Juli 2016) masih adem ayem. Para calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) se-Kalimantan Timur dan Kaltara diperkirakan baru ramai-ramai menyatakan diri sebagai kandidat, Senin ini. Di Kutai Kartanegara (Kukar), anggota KPU setempat Saidi mengkonfirmasi baru tim sukses (timses) dua pasangan dari jalur independen, yakni Rita Widyasari – Edi Damansyah dan Awang Wahyu – Andi Katanto, yang telah mengambil formulir pendaftaran. Itu pun masih tanda tanya. Sebab Rita – Edi masih harus mencari tambahan 9.800 dukungan KTP untuk melengkapi syarat, sedangkan Wahyu – Katanto bahkan masih kekurangan 54.498. Hasil verifikasi faktual ini membuat kubu Wahyu – Katanto mulai diragukan. Sebab, jumlah KTP yang harus dikumpulkan terbilang dua kali lipat dari kekurangan sebelumnya. Menurut Surat Kabar Harian di Samarinda (Kaltimpost, 28/7/2016). Banyak simpatisannya khawatir karena waktu semakin sempit sebelum pendaftaran ditutup besok sehingga jika Wahyu – Katanto gagal memenuhi syarat dukungan, Pilkada Kukar terancam hanya diikuti satu kontestan. KPU mengantisipasi dengan memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari, yakni sampai 31 juli. Jika tetap tak ada tambahan pendaftar maka Pilkada Kukar akan ditunda sampai 2017. Sampai hari ini (kemarin) belum ada calon dari parpol lain yang akan mendaftar, tapi ditunggu saja sampai 28 Juli nanti (Saldi, 2016). Geliat parpol di Kukar dalam pilkada ini memang membingungkan. Bahkan, Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD (19) belum mengusung calon. Kemarin, kejutan datang Rita Widyasari. Partai Beringin naga-naganya batal mendukung dia. Itu tercermin dari status profil *Blackberry Messenger (BBM)* – nya. Tapi, Rita tak mau ambil pusing dengan pangguna perahu Golkar, partai yang notabene dia pimpin sendiri di Kukar. Apalagi saat ini masih terjadi dualisme. Putri Syauckani HR itu memilih dengan mantap memperlihatkan surat rekomendasi lima dewan pimpinan pusat (DPP) partai, yakni PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, PKS, dan Hanura. Politik memang kejam, 19 kursi yang saya perjuangkan di DPRD Kukar. Karena hanya PAN yang lumayan banyak, yakni 6 kursi. Menurut Rita (incumbent) untuk maju pilkada ini, jika tak ada kisruh di tubuh Golkar tak perlu perahu lain.

Dinamika Bontang tak kalah panas. Niat ketua Golkar setempat Andi Harun berlayar menggunakan perahu partainya juga tak mulus. Belum ada kepastian Andi Harun jadi peserta Pilkada dari Golkar. Ada beberapa nama yang kami sodorkan ke

DPP ada nama Pak Adi (Darma), Pak Kahar (Kaharudin Jafar), serta bakal calon lain yang mendaftar ke Golkar. Yang pasti, kalau bukan hari ini (semalam) keluar rekomendasinya, besok (hari ini) baru ketahuan siapa yang bakal diusung Golkar. Kata Ketua Tim Pilkada DPD I Golkar Kalimantan Timur Dahri Yasin.

Dahri mengingatkan pula bahwa Neni Moernani, yang siap maju dari jalur Independen bersama Basri Rase, juga kader Golkar. Sebagai informasi, diantara seluruh parpol peraih kursi DPRD Bontang, hanya Golkar (5 kursi) yang bisa mengusung calon. PAN juga tak bisa diharapkan. Meski kader setempat menjagokan Andi Harun, restu DPP tak kunjung turun. Plt Ketua PAN Bontang Zain Taufiq Nur Rahman hanya menyatakan masih terjadi komunikasi politik di tingkat pusat terkait calon yang akan diusung.

Dengan begitu, Andi Harun siap-siap ketinggalan kereta. Sebab, tiga pasangan calon (paslon) lainnya akan mendaftar besok. Rencananya, Selasa (28/7) nanti, pasangan Suroyo – Etha mendaftar ke KPU. Untuk partainya, Gerindra dan PAN, kata sekretaris DPD Gerindra KalTim, Henry Pailan. Di Pilkada Bontang, Gerindra mengusung Suroyo – Etha Rimba. Kami tetap maju., tambah Henry, yang juga wakil ketua DPRD Kalimantan Timur itu.

Menurut Henry, yang juga wakil ketua DPRD Kalimantan Timur itu, gabungan dua partai sudah cukup untuk mengusung Suer hanya ketua KPU Bontang Suardi mengatakan baru dua pasangan yang sudah menyampaikan konfirmasi, yakni Adi Darma – Isro Umrghani, dan Neni – Basri. Kedua-duanya akan mendaftar Selasa, jelas Suardi. Terpisah, sang petahana Adi Darma mengatakan pendaftaran pihaknya akan diikuti 3-5 ribu pendukung. Rencananya mereka datang tepat pukul 12:00 Wita. Saat ini persiapan terus berjalan, tuturnya. Sedangkan Neni – Basri dijadwalkan datang ke KPU pukul 14:00 Wita. Meski maju perseorangan, Neni masih membuka diri untuk partai lain, termasuk Golkar. Kalau ada (partai) yang mau bergabung, mereka mengapresiasinya.

Dari kabar pilkada Paser bahwa KPU Paser menyebut (KPU Paser, Senin, 26 Juli 2016) akan ada tiga pasangan calon (paslon) mendaftar. Mereka sudah melakukan persiapan untuk tahapan ini (Ketua KPU Paser, Eka Yusda Indrawan) didampingi Koordinator Divisi Logistik Abdul Qayyim. Mereka Bambang Susilo – Sulaiman Eva Merukh (Bang Sule), Nanang Ramis – M Bahzar (NaZar), dan pasangan dari calon independen Mahmud – Ahmad Lukman. Bang Sule mengklaim mendapatkan dukungan empat partai politik, yakni PDI Perjuangan (3 kursi), Nasional Demokrat (2 kursi), Hanura (3 kursi), dan PAN (2 kursi). Surat keputusan sudah kami kantongi. Dengan demikian koalisi ini sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan kami mendaftar ke KPU, kata Bambang Susilo dalam Rapat Kerja abang Khusus (RaKercabsus) yang DPC PDIP Paser (Bambang Susilo, 25/7/2016) lalu, di Gedung Perempuan Berjaya. Namun, dari koalisi besar Golkar, PPP, dan PKB, justru belum ada kejelasan : apakah dukungan mengarah ke kader sendiri (M Mardikansyah) atau bergabung ke koalisi lain. Ini pasca mundurnya pencalonan ketua DPC Golkar sekaligus ketua DPRD Kaharuddin dari bursa.

Kabar dari Kutai Barat bahwa Pasangan Abed Nego dan Syaparudin (ASN) menunda mendaftar ke KPU Kutai Barat (KUBAR). Memang beberapa hari sebelumnya, paslon independen Abed – Syaparudin melapor ke KPU akan mendaftar pada hari pertama. Ternyata tidak jadi. Ada timnya datang kembali ke KPU melaporkan batal mendaftar karena terkendala teknis internal yang belum siap (Ketua KPU Kubar FX Irianto. Dia berharap paslon lain bisa berkoordinasi ke KPU. Ini agar memastikan jadwal pendaftaran agar tidak bertabrakan.

Pasangan calon independen lainnya, Amantius Ugau dan Muri, juga siap-siap mendaftar ke KPU. Begitu pula calon dari partai politik, FX Yapan dan Edyanto Arkan. Berkembang rumor lainnya, paslon lainnya Rama Asia dan M Jailani juga siap maju menggunakan perahu partai. Mereka akan mendaftar hari terakhir, kata sumber media ini di KPU. Untuk menerima rombongan pendaftar, KPU setempat telah menyiapkan empat tenda besar di depan kantor. Tenda ini digunakan untuk pendaftaran, para pendukung, paslon, undangan dari Panwaslu, serta aparat keamanan.

Kabar dari Kutai Timur bahwa hari ini, paslon akan mendaftar di kantor KPU Kutai Timur (kutim) di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, dikabarkan ada tiga, yakni : Ismunandar – Kasmidi Bulang (KB) pada pukul 10:00 wita, Ardiansyah Sulaiman – Alfian Aswad pada pukul 13:00 wita, dan Norbaiti Isran Noor – Ordiansyah pukul 15:00 wita. Waktu tersebut belum pasti, masih berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim sukses (Sayuti Ibrahim, KPU Kutim). Ismunandar – Kasmidi diusung PAN (1 kursi), PKB (1 kursi), PPP (6 kursi), Nasional Demokrat (3 kursi), dan Hanura (3 kursi). Ardiansyah – Alfian merupakan jagoan PKS (2) dan Demokrat (7). Sedangkan belum ada kepastian perahu untuk Norbaiti -Ordiansyah. Namun santer terdengar kabar bahwa PDIP (5), PKPI (1), dan Gerindra (4) berkoalisi untuk mengusung pasangan ini. Syarat KPU (PKPU) walaupun diundur (tiga hari setelah masa pendaftaran berakhir), itu bila yang mendaftar hanya satu paslon.

Kabar dari Balikpapan bahwa di Pilkada Balikpapan, jumlah dukungan yang dikumpulkan dua paslon independen memang jauh dari cukup. Namun, keduanya mantap mendaftarkan diri ke KPU setempat kemarin. Pasangan Hakim – Wahidah jadi yang pertama datang pada pukul 09:00 wita. Dilanjutkan pasangan Achdian – Abriantus pukul 14:00 wita. Sejauh ini, Achdian – Abriantus hanya mengumpulkan 1.139 dukungan. Sementara Hakim – Wahidah sedikit lebih banyak, 5.012 dukungan. Padahal jumlah dukungan minimal 44.854.

Jauh-jauh hari sudah kami persiapkan untuk mengantisipasi kekurangan jumlah dukungan, yakin Taufik Rahman, ketua Timses Hakim – Wahidah. Kami bersama tim di kecamatan, kelurahan terus bekerja dan terus melakukan input data. Insya Allah bisa terpenuhi, tegas Achdian pula. Kemarin, dia mendaftar diiringi salawat dan musik rebana oleh ibu-ibu pengajian. Ketua KPU Noor Thoha menjelaskan, berkas pendaftaran diserahkan diteliti lebih lanjut. Menurutnya, dalam berkas tersebut ada syarat pencalonan dan syarat calon. Yang harus ada adalah syarat pencalonan, seperti kalau dari parpol harus mendapat 20 persen kursi di

legislatif. Kemudian pembukaan rekening kampanye. Kalau itu tidak ada dianggap tidak mendaftar, terangnya.

KPU (KPU) se-Kalimantan Timur (Kaltimpost,26/7/16) serentak membuka pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah. Namun sebagian besar calon pesertanya masih enggan mendaftar sebagai pembuka. Terbukti dari sembilan kabupaten/kota pelaksana Pilkada, hanya Balikpapan yang ada pendaftar. Sementara Samarinda, Bontang, Kutim, Kubar, Kukar, Paser, Berau, maupun Mahakam Ulu sepi. Pasangan Achdian Noor – Abriantinus dan Abdul Hakim – Wahidah sudah mendaftar di KPU Balikpapan. Keduanya berasal dari jalur Independen, ucap Komisioner KPU Kaltim, Viko Januardy kemarin.

Berita dari Kota Tepian yaitu Samarinda, megah namun sepi, padahal KPU Samarinda sudah bersolek menunggu para pendaftar tiba. Yang ada hanya deretan kursi tersusun rapi. Hari pertama belum ada satu pun balon yang mengonfirmasi untuk mendaftar, ujar Ketua KPU Samarinda Ramon Dearnov Saragih kemarin. Kata dia, dari informasi yang diterima dari tim sukses pasangan Syahrie Jaang – Nusyirwan Ismail (Jaanur) akan mendaftar tanggal 27/7/2015 setelah zuhur sekitar pukul 12:30 wita. Bagaimana dengan pasangan lain?, misalnya, Jafar Abdul Gafar – Donna Farook. Kami belum mendapat Informasi mengenai itu, baru satu itu (Jaanur), sebut Ramon.

Dia menuturkan, pendaftaran untuk calon walikota dan Wakil Walikota Samarinda dibuka dari minggu sampai Selasa atau 26 – 28 Juli tahun 2015. Jika balon kepala daerah yang mendaftar hanya satu pasang, maka dilakukan perpanjangan waktu tiga hari. Kami akan melakukan sosialisasi, minimal mendapat satu pasang lagi dan pilwali tetap berjalan, terangnya. Antisipasi KPU Samarinda jika tetap hanya satu pasang balon walikota yang mendaftar maka pendaftaran dibuka kembali pada awal Agustus. Bila tetap hanya satu, Pilwali diundur 2017.

Menurut KPU lima tahun lalu, tepatnya Pilwali Samarinda 2010, pilihan calon walikota/wakil walikota lebih banyak. Padahal, tahun ini pilkada lebih baik dari sebelumnya, karena mendapat asupan dana dari KPU terkait dana publikasi. Seharusnya makin banyak yang mendaftar, mungkin jatuh dipersyaratkan karena makin berat. Pada tahun 2010 lalu, sambung dia, perolehan suara independen memang kalah telak dari calon yang diusung oleh partai, sehingga hal itu menjadi pengalaman dan evaluasi bagi calon independen. Padahal tak dipungut biaya, seharusnya lebih ramai.

Mengenai antisipasi, KPU RI punya rencana sendiri jika hanya satu calon. Informasi yang dihimpun harian KaltimPost, pilkada tetap berlanjut bila hanya satu calon. Caranya dengan pernyataan setuju secara serentak atau aklamasi. Demikian dikatakan Komisioner KPU Kalimantan Timur Viko Januardy. Viko menyatakan, informasi tersebut diperoleh dari Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas. Dia telah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, juga bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly kemarin.

Opsi aklamasi itu diutarakan oleh Pak Yosanna Laoly dengan membuat Perpu Pilkada, namun Presiden belum menyetujui hal tersebut lantaran hendak dikaji lebih dulu jelasnya. Saat ini bayangan calon tunggal kepala daerah menghantui Pilkada KalTim, dari sembilan daerah yang mengikuti Pilkada, Samarinda salah satunya. Hanya Jaanur yang mengerucut, sedangkan pasangan lain masih berhitung. Apabila tidak ada yang mendaftar dan tetap satu pasang calon, maka Pilkada ditunda hingga 2017. Pilihannya, menghindari Pilkada menggunakan pola aklamasi tadi, paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Samarinda Galeh Akbar Tanjung menyatakan, peraturan dibuat untuk menciptakan pemimpin yang baik, bukan menjadi salah partai yang sudah siap dengan kadernya. Tapi Galeh meragukan bila Samarinda hanya satu pasang calon. Gaung Pilkada sudah lama, saya kira partai politik memiliki skema tersendiri untuk mengusung pasangan, katanya. Kata Galeh, parpol harus berperan aktif memilih calon yang hendak diusung, Panwas Samarinda berharap peserta Pemilu berperan aktif dalam melaksanakan itu.

Lalu bagaimana dengan persiapan Panwaslu Samarinda saat ini tiap kelurahan sudah memulai pemutakhiran data pemilih. Jika belum terdaftar bisa melapor ke KPU atau PPS. Mereka hanya mengawasi proses tersebut untuk menghindari kecurangan pihaknya akan mengawasi tiap TPS dari 1.680 tempat memungut suara, seorang saksi akan ditempatkan. Anggaran untuk tahun ini sekitar Rp. 13 miliar, jadi sebagai honor saksi tentu akan ada peningkatan. Tapi, sebagai aturan, harus bekerja keras menjaga pengelembungan suara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada Pilkada ini bahwa :

1. Dinamika Pilkada di Indonesia agak berbeda karena Partai Golkar tidak dapat mencalonkan terkait kepengurusan ganda parati tersebut.
2. Banyak yang memilih ke jalur independen seperti Bontang dan Kutai Kartanegara.
3. Umumnya semua daerah konosif.
4. Khusus di Kalimantan Timur riaknya bervariasi namun masih dalam koridor pemilu yang terkendali.
5. Partai yang kurang suaranya tidak bisa ikut mencalonkan paslon.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Panitia dan KPU harus memelihara kondosivitas wilayah.
2. Aparata agar antisipasi kemungkinan terjelek.
3. Perlu pemetaan konflik pilkada.
4. Semua pihak menjaga pelaksanaan Pilkada yang Jurdil dan luber.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Jimly. Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20 (Makalah terbatas, diskusi, 18 Juli 2002).
- Mahfud MD, Moch. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media Indonesia.
- Suny, Ismail. Pembagian Kekuasaan Negara. Aksara baru : Jakarta.
- Surat Kabar harian Kaltim Post, 2015, Balikpapan.
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 2